

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai Implementasi Metode Sasaran Kerja Pegawai dalam Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jendral Pekerjaan Umum yaitu:

1. Pada faktor komunikasi, Pegawai sudah berjalan baik karena telah disampaikan langsung kepada seluruh PNS melalui sosialisasi. Proses komunikasi disini dikatakan baik karena sosialisasi mengenai Implementasi kebijakan Metode SKP diadakannya secara terus menerus.
2. Pada faktor sumber daya, sudah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dikatakan baik karena telah dilaksanakannya secara baik dan bertanggungjawab oleh seluruh PNS di BBWS-MS. Akan tetapi, sarana dan prasarana yaitu alat-alat yang digunakan belum memadai. Dibutuhksn anggaran pendukung besar dalam penyediaan fasilitas agar dapat mendukung sumber daya manusia yang baik dan efektif
3. Pada faktor disposisi, para pelaksana kebijakan selalu mendukung sepenuhnya program ini dan siap melaksanakannya dan sangat bermotivasi untuk tercapainya membangun kepercayaan dan membangun kebersamaan.

Penerapan norma-norma diBBWS-MS, sudah dilakukan sesuai peraturan atau tata tertib yang berlaku.

4. Pada faktor struktur birokrasi, telah berjalan secara efektif karena telah lengkapnya SOP. Struktur birokrasi di pejabat pelaksana bertugas sudah sesuai dengan ketentuannya masing-masing tugasnya. Mereka menjalankan tugas secara profesional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai sumbangsih penulis terhadap implementasi metode Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di BBWS-MS Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum yaitu :

1. Untuk mendapatkan dukungan dari PNS maka di perlukan adanya sosialisasi secara berlanjut agar metode ini dapat dievaluasi untuk membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS dalam menjalankan tugas sebagai aparatur Negara serta dijadikan bahan dalam pengembangan karir PNS.
2. Dalam implementasi Metode SKP diperlukan adanya peningkatan sumber daya yang non manusia yang berupa dana pendukung untuk menyediakan fasilitas, karena menyangkut berjalannya kegiatan tersebut.
3. Sebaiknya para pelaksana Metode SKP harus lebih memahami maksud dan sasaran kebijakan ini, agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara secara tepat dan efektif. Diperlukan adanya pelatihan maupun program pengembangan pegawai agar kinerja yang dicapai dapat lebih efektif.

4. Sebaiknya dilakukan penyempurnaan dengan cara dibuat SOP yang lebih teknis agar memudahkan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan metode SKP